



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 3 (Tiga) Tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat).
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang mejadi kewenangan Daerah.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 adalah rencana keuangan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah bahwa RKPD Tahun 2024 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini sebagai:
  - a. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
  - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dalam mendukung capaian target dan sasaran pembangunan Daerah; dan
  - c. secara normatif, menjadi dasar penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

BAB III  
PELAKSANAAN  
Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 8 (delapan) bab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah.
- (4) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang terdapat dalam Bab III, tidak memproyeksikan alokasi transfer alokasi dana khusus sehingga apabila terdapat

ketidaksesuaian pagu anggaran antara RKPD Tahun 2024 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024, maka akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian pada perubahan RKPD Tahun 2024.

- (5) Sasaran dan Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pagu anggaran setiap kegiatan yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab IV.

#### Pasal 4

Dalam rangka penyusunan rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 sebagai bahan acuan pembahasan kebijakan umum anggaran pendapatan belanja Daerah dan prioritas plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran perangkat Daerah bersama dewan perwakilan rakyat Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja setiap program dan kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan dimaksud.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah masing-masing.

#### Pasal 6

Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana

Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah dan/atau Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 27 Juni 2023

Plh. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

A. DARMAWAN BINTANG



Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 27 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,

A. DARMAWAN BINTANG

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 23



## BAB VI

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

#### 6.1. Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan, dimana merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kemampuan Keuangan dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Dalam Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah dapat digambarkan bahwa pendapatan daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp. 10.466.638.912.086,-** yang bersumber dari PAD sebesar Rp. 6.137.107.642.086,- dan pendapatan transfer sebesar **Rp. 4.322.109.630.000,-** serta Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar **Rp. 7.421.640.000** Pendapatan daerah tersebut akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan dalam rencana belanja daerah tahun 2024, dengan jumlah belanja daerah sebesar **Rp. 10.316.638.912.086,-** dan pembiayaan sebesar **Rp. 150.000.000.000,-**

Belanja daerah tahun 2024 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis money follow program priority dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2024, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah tahun 2024 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah, serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Struktur Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer, dengan rincian belanja berikut:

**Tabel VI.1.**  
**Rincian Kerangka Pendanaan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2024**

| NO.   | URAIAN  | TARGET                    | PROYEKSI                  |
|-------|---|---------------------------|---------------------------|
|       |   | TA. 2024                  | TA. 2025                  |
| 1     | 2   | 3                         | 4                         |
| 4.    | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          | <b>10,466,638,912,086</b> | <b>11.357.515.009.986</b> |
| 4,1   | <b>Pendapatan Asli Daerah</b>                     | <b>6,137,107,642,086</b>  | <b>6.854.927.042.262</b>  |
| 4.1.1 | Pajak Daerah                                      | 5,392,761,494,090         | 5.710.843.480.425         |
| 4.1.2 | Retribusi Daerah                                  | 48.409.105.600            | 55.353.734.092            |
| 4.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 137.963.752.246           | 168.760.544.726           |
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah         | 557,973,290,150           | 919.969.283.019           |



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| NO.           | URAIAN   | TARGET                    | PROYEKSI                  |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
|               |  | TA. 2024                  | TA. 2025                  |
| 1             | 2  | 3                         | 4                         |
| <b>4,2</b>    | <b>Pendapatan Transfer</b>                                 | <b>4.322.109.630.000</b>  | <b>4.494.667.435.721</b>  |
| 4.2.1         | <b>Dana Perimbangan</b>                                    | <b>4.267.538.133.000</b>  | <b>4.440.095.938.721</b>  |
| 4.2.1.1       | <b>Dana Transfer Umum</b>                                  | <b>2.785.140.262.000</b>  | <b>2.897.659.928.585</b>  |
| 4.2.1.1.1     | Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak               | 259.896.213.000           | 270.396.020.005           |
| 4.2.1.1.2     | Dana Alokasi Umum  | 2.525.244.049.000         | 2.627.263.908.580         |
| 4.2.1.2       | <b>Dana Transfer Khusus</b>                                | <b>1.482.397.871.000</b>  | <b>1.542.436.010.136</b>  |
| 4.2.1.2.1     | Dana Alokasi Khusus Fisik                                  | 314.693.468.000           | 1.542.436.010.136         |
| 4.2.1.2.1     | Dana Alokasi Khusus Fisik                                  | 1.167.704.403.000         | -                         |
| 4.2.2         | <b>Dana Insentif Daerah</b>                                | <b>54.571.497.000</b>     | <b>54.571.497.000</b>     |
| <b>4,3</b>    | <b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>                | <b>7.421.640.000</b>      | <b>7.920.532.003</b>      |
| 4.3.1         | Hibah  | 7.421.640.000             | 7.920.532.003             |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA DAERAH</b>                                      | <b>10.316.638.912.086</b> | <b>11.357.515.009.986</b> |
| <b>5.1.</b>   | <b>Belanja Operasi</b>                                     | <b>6.286.781.616.470</b>  | <b>5.705.310.456.652</b>  |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai  | 3.362.873.474.946         | 3.647.344.609.048         |
| 5.1.02        | Belanja Barang & Jasa                                      | 2.124.468.940.724         | 1.942.947.978.804         |
| 5.1.03        | Belanja Bunga  | -                         | -                         |
| 5.1.04        | Belanja Subsidi  | 20.000.000.000            | 20.000.000.000            |
| 5.1.05        | Belanja Hibah  | 776.989.200.800           | 90.737.868.800            |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial                                     | 2.450.000.000             | 4.280.000.000             |
| <b>5.2.</b>   | <b>Belanja Modal</b>                                       | <b>1.838.230.183.859</b>  | <b>2.579.569.436.205</b>  |
| <b>5.2.01</b> | Belanja Modal  | 1.838.230.183.859         | 2.579.569.436.205         |
| <b>5.3.</b>   | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                               | <b>32.000.000.000</b>     | <b>40.000.000.000</b>     |
| <b>5.3.01</b> | Belanja Tidak Terduga                                      | 32.000.000.000            | 40.000.000.000            |
| <b>5.4.</b>   | <b>Belanja Transfer</b>                                    | <b>2.159.627.111.757</b>  | <b>2.867.635.117.129</b>  |
| 5.4.01        | Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes       | 2.129.627.111.757         | 2.600.171.570.129         |
| 5.4.02        | Belanja Bantuan Keuangan kpd Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes | 30.000.000.000            | 267.463.547.000           |
| <b>6.2</b>    | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>                              | <b>150.000.000.000</b>    | <b>165.000.000.000</b>    |
| 6.2.1         | Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo            | 135.000.000.000           | 135.000.000.000           |
| 6.2.2         | Penyertaan Modal Daerah                                    | 15.000.000.000            | 30.000.000.000            |

Sumber : BKAD dan Bapenda Provinsi Sulsel Tahun 2024-2026

## 6.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Pelaksanaan proses penyusunan penetapan program prioritas telah melalui tahapan dan prosedur perencanaan yang sesuai dengan aturan, ditetapkan dan menjadi dasar acuan dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2024, Perumusan program prioritas pembangunan daerah yang merupakan panduan dalam menentukan kegiatan prioritas perangkat daerah yang terdiri dari 5(Lima) prioritas pembangunan.

Prioritas pertama Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif dengan 2 sasaran dan dijabarkan dalam 9 (Sembilan) program prioritas, prioritas kedua Peningkatan Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas dan merata dengan 1(satu) sasaran dijabarkan ke dalam 8 (Delapan) Program, Prioritas pembangunan ke 3 Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah

dengan 1 (satu) Sasaran yang dijabarkan kedalam 9 (Sembilan) Program; Priritas Pembangunan ke 4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkualitas dan Merata dengan 4 (Empat) sasaran yang dijabarkan kedalam 15 (lima belas) program, dan untuk prioritas pembangunan ke 5 (Lima) Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup dengan 1 (Satu) sasaran yang dijabarkan ke dalam 8 (delapan) program prioritas.

Secara keseluruhan prioritas pembangunan tahun 2024 adalah sebanyak 5 (Lima) prioritas pembangunan dengan 9 (sembilan) sasaran, dan 50 (Lima Puluh) program prioritas sebagai mana di jabarkan pada tabel VI.2. berikut.

**Tabel VI.2.  
Prioritas dan Program Pembangunan Daerah Tahun 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah   | Sasaran Prioritas Pembangunan                          | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program                        | Target 2024   |                   | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah  |  |
|-----|--|--|--|--|---|-------------------|--------------------|-------------------|--|
|     |  |  |  |  | Kinerja   | Anggaran (Rp)     | Tahun 2025         |                   |  |
| 1   | 2  | 3  | 4                                      | 5  | 6   | 7                 | 8                  | 9                 |  |
| I   |  |  |  |  |   | 51.433.415.721,00 | 69.612.625.600,35  |                   |  |
| 1   | Peningkatan Tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah | 1                                      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan | 50%               | 3.659.521.967,00   | 10.216.343.257,00 | BADAN PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|     |  |  |  |  | Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan                        | 50%               |                    |                   |  |
|     |  |  |  |  | Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan   | 100%              |                    |                   |  |
|     |  |  |  |  | Jumlah Akreditasi Program Pelatihan   | 6 Sertifikat      |                    |                   |  |
|     |  |  | 2                                      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH               | Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai ASN;   | 65                | 5.518.938.200,00   | 4.259.158.848,00  | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                   |
|     |  |  |  |  | Persentase ASN yang menduduki jabatan struktural dan fungsional berbasis talenta;   | 85                |                    |                   |  |
|     |  |  |  |  | Persentase ASN  | 93                |                    |                   |  |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program   | Target 2024  |               | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah  |   |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|--------------------|-------------------|---|
|     |                              |                               |  |   | Kinerja  | Anggaran (Rp) | Tahun 2025         |                   |   |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5   | 6  | 7             | 8                  | 9                 |   |
|     |                              |                               |  | berkinerja baik dan sangat baik   |  |               |                    |                   |   |
|     |                              |                               | 3                                      | PROGRAM PENATAAN ORGANISASI   | Persentase kesesuaian program prioritas dengan struktur organisasi perangkat daerah    | 100%          | 3.604.445.846,00   | 4.638.872.313,00  | Biro Organisasi   |
|     |                              |                               | 4                                      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                       | % Konsistensi Program RPJMD/RPD terhadap RKPD  | 100 %         | 5.981.772.438,00   | 5.962.408.574,00  | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|     |                              |                               |  | % Konsistensi Program RKPD terhadap APBD  | 100 %  |               |                    |                   |   |
|     |                              |                               |  | Rata-Rata Capaian Kinerja Program Prioritas Pembangunan Daerah                          | 91%  |               |                    |                   |   |
|     |                              |                               | 5                                      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN  | Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Perangkat Daerah terhadap Hasil Pemeriksaan APIP | 81%           | 19.751.106.000,00  | 21.659.135.903,35 | INSPEKTORAT   |
|     |                              |                               |  | Persentase Penyelesaian Tindak lanjut Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten / Kota | 74%  |               |                    |                   |   |
|     |                              |                               |  | Persentase OPD yang hasil nilai SAKIP nya meningkat                                     | 100%   |               |                    |                   |   |
|     |                              |                               | 6                                      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI  | Persentase Aplikasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi                               | 50%           | 3.574.000.000,00   | 5.597.775.790,00  | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN                      |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No.       | Prioritas Pembangunan Daerah                                      | Sasaran Prioritas Pembangunan                    | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program                                   | Target 2024   |               | Perkiraan Anggaran        | Perangkat Daerah          |   |
|-----------|---|--|--|---|---|---------------|---------------------------|---------------------------|---|
|           |   |  |  |   | Kinerja   | Anggaran (Rp) | Tahun 2025                |                           |   |
| 1         | 2   | 3  | 4                                      | 5   | 6   | 7             | 8                         | 9                         |   |
|           |   |  |  | INFORMATIKA   | Sulawesi Selatan Yang Terintegrasi  |               |                           |                           | PERSANDIAN  |
|           |   |  |  |   | Persentase Unit Kerja Yang Terkoneksi Jaringan Internet Intra Pemerintah Sulawesi Selatan | 44%           |                           |                           |   |
|           |   | Optimalnya Kualitas pelayanan publik             | 7                                      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Informasi Publik                              | 40            | 5.438.631.270,00          | 9.734.021.917,00          | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN           |
|           |   |  | 8                                      | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL                   | Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP                  | 92%           | 1.120.000.000,00          | 1.652.000.000,00          | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP                                    |
|           |   |  | 9                                      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH          | Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah.                         | 30 %          | 2.785.000.000,00          | 5.892.908.998,00          | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH |
|           |   |  |  |   | Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi dan Teknologi                       | 13 %          |                           |                           |   |
| <b>II</b> |   |  |  |   |   |               | <b>865.302.620.361,55</b> | <b>947.013.975.433,56</b> |   |
| 2         | Peningkatan Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata | Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah | 10                                     | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                       | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap  | 76%           | 596.100.311.479,00        | 659.647.214.566,88        | DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI                              |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program  | Target 2024  |               | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah   |  |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|--------------------|--------------------|--|
|     |                              |                               |  |  | Kinerja  | Anggaran (Rp) | Tahun 2025         |                    |  |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5  | 6  | 7             | 8                  | 9                  |  |
|     |                              |                               | 11                                     | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR                                    | Luas daerah jaringan irigasi yang direhabilitasi   | 6046 Ha       | 134.116.183.943,55 | 94.567.414.185,94  | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG |
|     |                              |                               |  |  | Cakupan pembinaan pengelolaan SDA  | 100%          |                    |                    |  |
|     |                              |                               | 12                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN  | Jumlah arus penumpang melalui pelabuhan  | 1.779.975     | 3.830.000.000,00   | 4.820.000.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN                                  |
|     |                              |                               |  |  | Jumlah pelabuhan Pengumpan yang beroperasi   | 100%          |                    |                    |  |
|     |                              |                               | 13                                     | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISRIKAN                                   | Persentase Rumah Tangga berListrik   | 100           | 2.466.052.372,00   | 957.597.059,00     | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL               |
|     |                              |                               | 14                                     | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPM) | Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota (SPM)      | 100           | 102.565.000.000,00 | 179.461.691.699,74 | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG |
|     |                              |                               |  |  | Cakupan Pembinaan Layanan Air Minum kewenangan provinsi  | 100%          |                    |                    |  |
|     |                              |                               | 15                                     | PROGAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH (SPM)            | Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Air Limbah Domestik Regional Lintas kab/Kota (SPM) | 95            | 150.000.000,00     | 105.236.362,00     | DINAS SUMBER DAYA AIR, CIPTA KARYA, DAN TATA RUANG |
|     |                              |                               |  |  | Cakupan Pembinaan Layanan Air Limbah   | 100%          |                    |                    |  |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No.        | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program                                       | Target 2024  |               | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah |  |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--|---|--|---------------|--------------------|------------------|--|
|            |                              |                               |  |   | Kinerja  | Anggaran (Rp) | Tahun 2025         |                  |  |
| 1          | 2                            | 3                             | 4                                      | 5   | 6  | 7             | 8                  | 9                |  |
|            |                              |                               |  | Domestik kewenangan provinsi                            |  |               |                    |                  |  |
|            |                              |                               | 16                                     | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                              | Persentase Luas Kawasan Kumuh Tertangani Kewenangan Provinsi   | 4,46 %        | 3.045.477.093,00   | 1.334.821.560,00 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|            |                              |                               | 17                                     | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM | Persentase rumah tangga yang berakses air minum layak dan aman di kawasan permukiman   | 26,67%        | 21.363.021.857,00  | 3.450.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|            |                              |                               |  |   | Persentase kawasan permukiman yang terbangun drainase  | 25,71%        |                    |                  |  |
|            |                              |                               |  |   | Persentase kawasan permukiman yang terbangun jalan lingkungan  | 16,67%        |                    |                  |  |
|            |                              |                               | 18                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN (SPM)                    | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni(SPM) | 100%          | 1.666.573.617,00   | 2.670.000.000,00 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN |
|            |                              |                               |  |   | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni(SPM)   | 100%          |                    |                  |  |
| <b>III</b> |                              |                               |  |   |  |               |                    |                  |  |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah                                      | Sasaran Prioritas Pembangunan                                 | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program                                    | Target 2024   |                           | Perkiraan Anggaran        | Perangkat Daerah   |   |
|-----|---|---|--|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|---|
|     |   |   |  |  | Kinerja   | Anggaran (Rp)             | Tahun 2025                |                    |   |
| 1   | 2   | 3   | 4                                      | 5  | 6   | 7                         | 8                         | 9                  |   |
|     |   |   |  |  |   | <b>239.939.226.460,00</b> | <b>317.039.425.208,00</b> |                    |   |
| 3   | Peningkatan Produktifitas dan Nilai Tambah Produk unggulan Daerah | Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang berkualitas | 19                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                | Nilai Produksi Perikanan Tangkap  | 11933560000               | 27.305.000.000,00         | 32.619.100.000,00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                      |
|     |   |   |  |  | Jumlah produksi perikanan tangkap   | 442.959,60                |                           |                    |   |
|     |   |   |  |  | Cakupan Bina Kelompok Nelayan   | 29%                       |                           |                    |   |
|     |   |   |  |  | Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan  | 30.62%                    |                           |                    |   |
|     |   |   |  |  | Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional | 84,21                     |                           |                    |   |
|     |   |   | 20                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA               | Nilai produksi perikanan budidaya   | #####                     | 7.653.000.000,00          | 11.345.500.000,00  | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                      |
|     |   |   |  |  | Jumlah Produksi perikanan budidaya  | 4.331.299,7               |                           |                    |   |
|     |   |   |  |  | Persentase ketersediaan benur berkualitas   | 85%                       |                           |                    |   |
|     |   |   | 21                                     | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan  | 2                         | 181.459.324.600,00        | 235.948.255.908,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
|     |   |   |  |  | Persentase Peningkatan  | 2                         |                           |                    |   |



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program   | Target 2024                                  |                   | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah                     |                                     |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|---|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|     |                              |                               |  |   | Kinerja                                      | Anggaran (Rp)     | Tahun 2025         |                                      |                                     |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5   | 6  | 7                 | 8                  | 9                                    |                                     |
|     |                              |                               |  | Produksi Hortikultura   |  |                   |                    |                                      |                                     |
|     |                              |                               |  | Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan                          | 2  |                   |                    |                                      |                                     |
|     |                              |                               |  | Nilai Hilirisasi Produk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan | 56.290.226.087                               |                   |                    |                                      |                                     |
|     |                              |                               |  | Persentase Peningkatan Populasi Ternak Sapi                         | 1,16   | 10.646.083.382,00 | 9.380.000.000,00   | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |                                     |
|     |                              |                               |  | Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Pedaging                | 2,12   |                   |                    |                                      |                                     |
|     |                              |                               |  | Persentase Peningkatan Populasi Ternak Ayam Ras Petelur             | 2,73   |                   |                    |                                      |                                     |
|     |                              |                               |  | Persentase Peningkatan Populasi Ternak Perah                        | 2,23   |                   |                    |                                      |                                     |
|     |                              |                               | 22                                     | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                   | Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan | 391.940.000,00    | 1.630.400.000,00   | 2.815.000.000,00                     | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN        |
|     |                              |                               |  | Produksi olahan ikan  | 6.150,43                                     |                   |                    |                                      |                                     |
|     |                              |                               |  | Persentase pengujian mutu produk perikanan                          | 100  |                   |                    |                                      |                                     |
|     |                              |                               | 23                                     | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                        | Persentase pertumbuhan jumlah industri       | 7,0%              | 4.446.672.433,00   | 15.650.000.000,00                    | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |
|     |                              |                               | 24                                     | PROGRAM   | Nilai Ekspor Perdagangan                     | 1.881.893.365     |                    |                                      | DINAS                               |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No.       | Prioritas Pembangunan Daerah                                     | Sasaran Prioritas Pembangunan                     | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program                                    | Target 2024   |                | Perkiraan Anggaran          | Perangkat Daerah              |  |
|-----------|--|---|--|--|---|----------------|-----------------------------|-------------------------------|--|
|           |  |   |  |  | Kinerja   | Anggaran (Rp)  | Tahun 2025                  |                               |  |
| 1         | 2  | 3   | 4                                      | 5  | 6   | 7              | 8                           | 9                             |  |
|           |  |   |  | PENGEMBANGAN EKSPORT                                 |   | 540.000.000,00 | 2.540.000.000,00            | PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |  |
|           |  |   | 25                                     | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | Persentase peningkatan destinasi wisata menjadi destinasi wisata unggulan       | 0,7            | 3.575.321.888,00            | 2.031.513.000,00              | DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN      |
|           |  |   |  |  | Persentase Kab/Kota yang memiliki kawasan wisata Ramah Muslim (Muslim Friendly) | 12,5           |                             |                               |  |
|           |  |   | 26                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM                            | Persentase UMKM yang terfasilitasi Pengembangan Usaha                           | 10             | 2.683.424.157,00            | 4.710.056.300,00              | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH |
|           |  |   |  |  | Cakupan promosi produk UMKM (Prioritas)   | 3              |                             |                               |  |
| <b>IV</b> |  |   |  |  |   |                | <b>1.328.014.884.874,00</b> | <b>1.439.294.354.936,00</b>   |  |
| 4         | Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang berkualitas dan merata | Meningkatnya Kualitas dan Penyerapan Tenaga Kerja | 27                                     | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                      | Persentase Pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan (%)                     |                | 745.753.240,00              | 684.828.564,00                | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI      |
|           |  |   |  |  | Persentase daya serap tenaga kerja  |                |                             |                               |  |
|           |  |   | 28                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                       | 0,50           | 5.045.501.655,00            | 4.577.000.000,00              | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA            |
|           |  |   |  |  | Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial    | 4,50           |                             |                               |  |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program  | Target 2024  |               | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah  |   |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------|--------------------|-------------------|---|
|     |                              |                               |  |  | Kinerja  | Anggaran (Rp) | Tahun 2025         |                   |   |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5  | 6  | 7             | 8                  | 9                 |   |
|     |                              |                               | 29                                     | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                       | Persentase pencari kerja terlatih yang mendapatkan pekerjaan                                   | 85,00%        | 5.803.435.124,00   | 3.870.000.000,00  | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI               |
|     |                              |                               |  |  | Persentase tenaga kerja yang dilatih berwirausaha dapat mandiri                                | 100,00%       |                    |                   |   |
|     |                              |                               | 30                                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)                      | Cakupan UMKM yang diberdayakan   | 10            | 6.871.800.000,00   | 4.025.000.000,00  | DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH          |
|     |                              | Menurunnya angka kemiskinan   | 31                                     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  | Persentase PPKS yang mendapatkan Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial dari yang ditargetkan | 100%          | 2.330.969.099,00   | 3.078.896.524,00  | DINAS SOSIAL                                      |
|     |                              |                               | 32                                     | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | Persentase peningkatan kemampuan (kelola kelembagaan, kelola usaha, kelola kawasan) KTH        | 1,75          | 334.504.400,00     | 2.657.920.000,00  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN              |
|     |                              |                               | 33                                     | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA  | Rasio Luas areal pertanian yang terdampak pembangunan prasarana terhadap                       | 0,0076        | 60.241.468.610,00  | 73.608.000.000,00 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program  | Target 2024 |                  | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah                     |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
|     |                              |                               |  |  | Kinerja     | Anggaran (Rp)    | Tahun 2025         |                                      |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5  | 6           | 7                | 8                  | 9                                    |
|     |                              |                               | PERTANIAN                              | luasan lahan pertanian   |             |                  |                    |                                      |
|     |                              |                               |  | Nilai Produksi Hasil Ternak (Juta)   | 10.248.954  | 586.189.700,00   | 3.230.000.000,00   | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN |
|     |                              |                               | 34 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL         | Persentase Dokumen Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Yang Diterbitkan             | 100%        | 1.457.984.600,00 | 2.032.841.721,00   | DINAS SOSIAL                         |
|     |                              |                               |  | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif memberikan pelayanan ke Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) | 100%        |                  |                    |                                      |
|     |                              |                               | 35 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL(SPM)    | Persentase Pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Tuna Sosial dalam panti  | 100%        | 3.051.582.500,00 | 4.447.398.525,00   | Dinas Sosial                         |
|     |                              |                               |  | Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)                                     | 100%        |                  |                    |                                      |
|     |                              |                               |  | Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)   | 100%        |                  |                    |                                      |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan                          | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program   | Target 2024  |               | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah   |                  |
|-----|------------------------------|--|--|---|--|---------------|--------------------|--------------------|------------------|
|     |                              |  |  |   | Kinerja  | Anggaran (Rp) | Tahun 2025         |                    |                  |
| 1   | 2                            | 3  | 4                                      | 5   | 6  | 7             | 8                  | 9                  |                  |
|     |                              |  |  | Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)                             | 100%   |               |                    |                    |                  |
|     |                              |  |  | Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (SPM)                          | 100%   |               |                    |                    |                  |
|     |                              | Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif dan Inklusif | 36                                     | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | Persentase siswa SMA/SMK yang bebas buta aksara Al-Quran | 89,25         | 922.174.613.347,00 | 905.917.479.735,00 | DINAS PENDIDIKAN |
|     |                              |  |  | Persentase SMA/SMK yang bebas Narkoba (indikator RPJMD pokok)   | 95,38  |               |                    |                    |                  |
|     |                              |  |  | Persentase jumlah warga negara usia 16 -18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (SPM)                | 100  |               |                    |                    |                  |
|     |                              |  |  | Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi siswa berdasarkan Asesmen Nasional  | 100  |               |                    |                    |                  |
|     |                              |  |  | Persentase jumlah warga negara usia 4 - 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam | 100  |               |                    |                    |                  |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program   | Target 2024  |                  | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah                             |                 |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|---|--|------------------|--------------------|--|-----------------|
|     |                              |                               |  |   | Kinerja  | Anggaran (Rp)    | Tahun 2025         |  |                 |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5   | 6  | 7                | 8                  | 9  |                 |
|     |                              |                               |  | pendidikan Khusus (SPM)   |  |                  |                    |  |                 |
|     |                              |                               | 37                                     | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN                                | % Pemenuhan SDM Berkualitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | 85%              | 1.722.485.000,00   | 700.000.000,00                               | DINAS KESEHATAN |
|     |                              |                               |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat (Orang / Bulan) | 189  | 5.529.059.304,00 | 5.529.059.304,00   | RSUD HAJI                                    |                 |
|     |                              |                               |  | Persentase Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi (%)              | 5  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00      | UPT TRANSFUSI DARAH                          |                 |
|     |                              |                               |  | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi  | 70   | 400.000.000,00   | 400.000.000,00     | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH            |                 |
|     |                              |                               |  | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan(%)                         | 100  | 250.000.000,00   | 250.000.000,00     | UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT |                 |
|     |                              |                               |  | Persentase SDM Kesehatan yang bersertifikasi (%)  | 100  | 245.248.314,00   | 700.000.000,00     | RSUD LABUANG BAJI                            |                 |
|     |                              |                               | 38                                     | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN   | % Rumah Sakit yang Terakreditasi                             | 85%              | 120.548.707.961,00 | 112.386.029.935,00                           | DINAS KESEHATAN |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program   | Target 2024 |               | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|---------------|--------------------|------------------|
|     |                              |                               |  |   | Kinerja     | Anggaran (Rp) | Tahun 2025         |                  |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5   | 6           | 7             | 8                  | 9                |
|     |                              |                               |  | PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |             |               |                    |                  |
|     |                              |                               |  | Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM)                                      | 100%        |               |                    |                  |
|     |                              |                               |  | Persentase penduduk/warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (SPM) | 100%        |               |                    |                  |
|     |                              |                               |  | % Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapatkan Tambahan Asupan Gizi  | 95%         |               |                    |                  |
|     |                              |                               |  | % Anak Berusia Dibawah Lima Tahun (Balita) Gizi Kurang yang Mendapat Tambahan Asupan Gizi   | 90%         |               |                    |                  |
|     |                              |                               |  | Cakupan Kunjungan Lengkap Ibu Hamil (K6)  | 75%         |               |                    |                  |
|     |                              |                               |  | Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap (KN Lengkap)   | 97%         |               |                    |                  |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program   | Target 2024         |                   | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah                             |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------|-------------------|--------------------|--|
|     |                              |                               |  |   | Kinerja             | Anggaran (Rp)     | Tahun 2025         |  |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5   | 6                   | 7                 | 8                  | 9  |
|     |                              |                               |  | Angka Kematian Akibat Penyakit Menular  | 10/100.000 Penduduk |                   |                    |  |
|     |                              |                               |  | % Penduduk sesuai Kelompok Usia yang dilakukan Skirining Penyakit Tidak Menular | 90%                 |                   |                    |  |
|     |                              |                               |  | Persentase Pemenuhan Permintaan Kebutuhan Darah Pada Fasilitas Kesehatan (%)    | 80                  | 10.630.000.000,00 | 5.930.000.000,00   | UPT TRANSFUSI DARAH                          |
|     |                              |                               |  | Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program                               | 85                  | 7.710.132.460,00  | 7.710.132.460,00   | UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH            |
|     |                              |                               |  | Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)       | 100                 | 2.449.335.280,00  | 2.449.335.280,00   | UPT RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH GIGI DAN MULUT |
|     |                              |                               |  | Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)       | 100                 | 19.942.162.200,00 | 17.362.677.219,00  | RSUD LABUANG BAJI                            |
|     |                              |                               |  | Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)       | 100                 | 1.367.872.471,00  | 1.367.872.471,00   | RSUD HAJI                                    |
|     |                              |                               |  | Cakupan pemenuhan   | 100                 |                   |                    | RS KHUSUS DAERAH                             |



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program   | Target 2024                    |                   | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah                   |                               |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|     |                              |                               |  |   | Kinerja                        | Anggaran (Rp)     | Tahun 2025         |                                    |                               |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5   | 6                              | 7                 | 8                  | 9                                  |                               |
|     |                              |                               |  | Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%)                   |                                | 700.000.000,00    | 400.000.000,00     | DADI                               |                               |
|     |                              |                               |  | Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%) | 100                            | 2.119.929.584,00  | 7.550.000.000,00   | RSK IBU DAN ANAK PERTIWI           |                               |
|     |                              |                               |  | Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%) | 100                            | 200.000.000,00    | 20.000.000,00      | RSKD IBU DAN ANAK SITI FATIMAH     |                               |
|     |                              |                               |  | Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik(%)  | 65.76                          | 400.000.000,00    | 5.786.908.815,00   | RSUD SAYANG RAKYAT                 |                               |
|     |                              |                               |  | Cakupan pemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Dalam Kondisi Baik (%) | 65                             | 39.381.421.837,00 | 35.150.000.000,00  | RSUD REGIONAL LA MAPPAPENNING BONE |                               |
|     |                              |                               | 39                                     | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                              | Peningkatan Prestasi olah raga | 0,4               | 104.091.930.788,00 | 225.322.881.983,00                 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA |
|     |                              |                               |  | Persentasi ketersediaan sarana dan prasarana olahraga                     |                                | 45                |                    |                                    |                               |
|     |                              | Meningkatnya                  | 40                                     | PROGRAM   | Persentase Pemenuhan           | 65%               |                    | DINAS                              |                               |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No.      | Prioritas Pembangunan Daerah             | Sasaran Prioritas Pembangunan   | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program                                 | Target 2024   |               | Perkiraan Anggaran       | Perangkat Daerah         |  |
|----------|--|---|--|---|---|---------------|--------------------------|--------------------------|--|
|          |  |   |  |   | Kinerja   | Anggaran (Rp) | Tahun 2025               |                          |  |
| 1        | 2  | 3   | 4                                      | 5   | 6   | 7             | 8                        | 9                        |  |
|          |  | Kualitas dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan                      |  | PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | Indikator prasyarat PUG di Tk. Provinsi   |               | 665.000.000,00           | 880.000.000,00           | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA |
|          |  |   |  |   | Persentase ARG di Tingkat Provinsi  | 40%           |                          |                          |  |
|          |  |   |  |   | Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi               | 35,5%         |                          |                          |  |
|          |  |   | 41                                     | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK                        | Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak  | 87,5%         | 472.705.000,00           | 645.000.000,00           |  |
|          |  |   | 42                                     | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                  | Persentase Kabupaten/Kota yang menyediakan layanan anak korban kekerasan yang terstandarisasi | 54,16%        | 495.092.400,00           | 575.092.400,00           |  |
| <b>V</b> |  |   |  |   |   |               | <b>36.291.362.957,00</b> | <b>41.646.494.028,00</b> |  |
| 5        | Peningkatan Pelestarian lingkungan hidup | Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan | 43                                     | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                         | Persentase peningkatan produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu                               | 21,15         | 6.927.847.280,00         | 5.292.514.000,00         | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN   |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program   | Target 2024 |                  | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah                                  |
|-----|------------------------------|-------------------------------|--|---|-------------|------------------|--------------------|---|
|     |                              |                               |  |   | Kinerja     | Anggaran (Rp)    | Tahun 2025         |   |
| 1   | 2                            | 3                             | 4                                      | 5   | 6           | 7                | 8                  | 9   |
|     |                              | mitigasi perubahan iklim      |  |   |             |                  |                    |   |
|     |                              |                               |  | Persentase akses pengelolaan kawasan hutan lindung dan hutan produksi   | 11,91       |                  |                    |   |
|     |                              |                               |  | Persentase penurunan kerusakan kawasan hutan  | 0,029       |                  |                    |   |
|     |                              |                               |  | Persentase peningkatan tutupan lahan hasil rehabilitasi diluar kawasan hutan negara                                     | 3,57        |                  |                    |   |
|     |                              |                               | 44                                     | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN<br>Persentase Kelompok Tani/Ternak Yang Mendapatkan Diseminasi Penyuluhan dan Pemberdayaan | 100         | 209.083.600,00   | 1.800.000.000,00   | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN              |
|     |                              |                               |  | Persentase Petani Yang Menerapkan Teknologi   | 50          | 2.000.000.000,00 | 5.800.000.000,00   | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN |
|     |                              |                               |  | Persentase Kelembagaan Petani Yang Meningkatnya Kapasitasnya  | 10          |                  |                    |   |
|     |                              |                               | 45                                     | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN<br>Persentase penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor Energi (Ton CO2 eq)      | 1,3         | 1.527.104.753,00 | 1.679.815.228,00   | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL              |
|     |                              |                               | 46                                     | PROGRAM<br>Penurunan emisi GRK  | 334728.000  |                  |                    | DINAS   |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No. | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas)                                  | Indikator Program  | Target 2024  |                  | Perkiraan Anggaran | Perangkat Daerah                     |
|-----|------------------------------|-------------------------------|---|--|--------------|------------------|--------------------|--------------------------------------|
|     |                              |                               |   |  | Kinerja      | Anggaran (Rp)    | Tahun 2025         |                                      |
| 1   | 2                            | 3                             | 4   | 5  | 6            | 7                | 8                  | 9                                    |
|     |                              |                               | PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN                          | sektor transportasi (Ton)  |              | 8.724.000.000,00 | 6.550.000.000,00   | PERHUBUNGAN                          |
|     |                              |                               |   | Cakupan prasarana Keselamatan Jalan dalam kondisi baik (%)               | 5.000        |                  |                    |                                      |
|     |                              |                               |   | Jumlah penumpang melalui terminal (Orang)                                | 628.431      |                  |                    |                                      |
|     |                              |                               |   | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan (%)              | 33.780       |                  |                    |                                      |
|     |                              |                               | 47 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL          | Perluasan kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | 8.116.593,22 | 9.735.000.000,00 | 8.756.750.000,00   | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN         |
|     |                              |                               |   | Jumlah produksi garam rakyat   | 5.000,00     |                  |                    |                                      |
|     |                              |                               |   | Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana mendukung produksi perikanan         | 56,89        |                  |                    |                                      |
|     |                              |                               | 48 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Potensi emisi GRK dari sektor limbah                                     | 15257,36     | 703.619.800,00   | 2.950.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
|     |                              |                               | 49 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                                      | Persentase Sampah Perkotaan yang tertangani                              | 55           | 127.000.000,00   | 800.000.000,00     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
|     |                              |                               | 50 PROGRAM  | Persentase Korban  | 100          |                  |                    | SATUAN POLISI                        |

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| No.          | Prioritas Pembangunan Daerah | Sasaran Prioritas Pembangunan | Program Pembangunan Daerah (Prioritas) | Indikator Program  | Target 2024 |                             | Perkiraan Anggaran          | Perangkat Daerah                    |
|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|              |                              |                               |  |  | Kinerja     | Anggaran (Rp)               | Tahun 2025                  |                                     |
| 1            | 2                            | 3                             | 4                                      | 5  | 6           | 7                           | 8                           | 9                                   |
|              |                              |                               | PENANGGULANGAN BENCANA                 | Bencana yang tertangani (%)  |             | 325.347.524,00              | 835.000.000,00              | PAMONG PRAJA                        |
|              |                              |                               |  | Persentase Dokumen Kebencanaan sampai dengan sah/legal yang tersedia | 100         | 6.012.360.000,00            | 7.182.414.800,00            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|              |                              |                               |  | Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih                | 100         |                             |                             |                                     |
|              |                              |                               |  | Persentase Tanggap Darurat Bencana yang tertangani                   | 100         |                             |                             |                                     |
| <b>TOTAL</b> |                              |                               |  |  |             | <b>2.520.981.510.373,55</b> | <b>2.814.606.875.205,91</b> |                                     |

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan, Tahun 2023